



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU UTARA



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

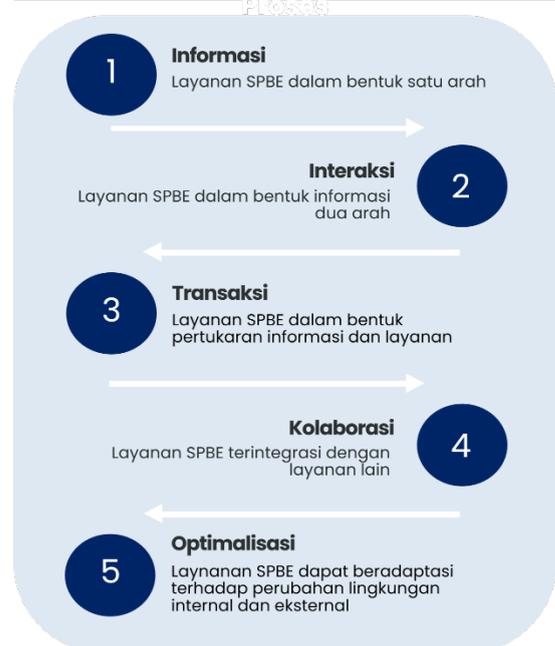
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



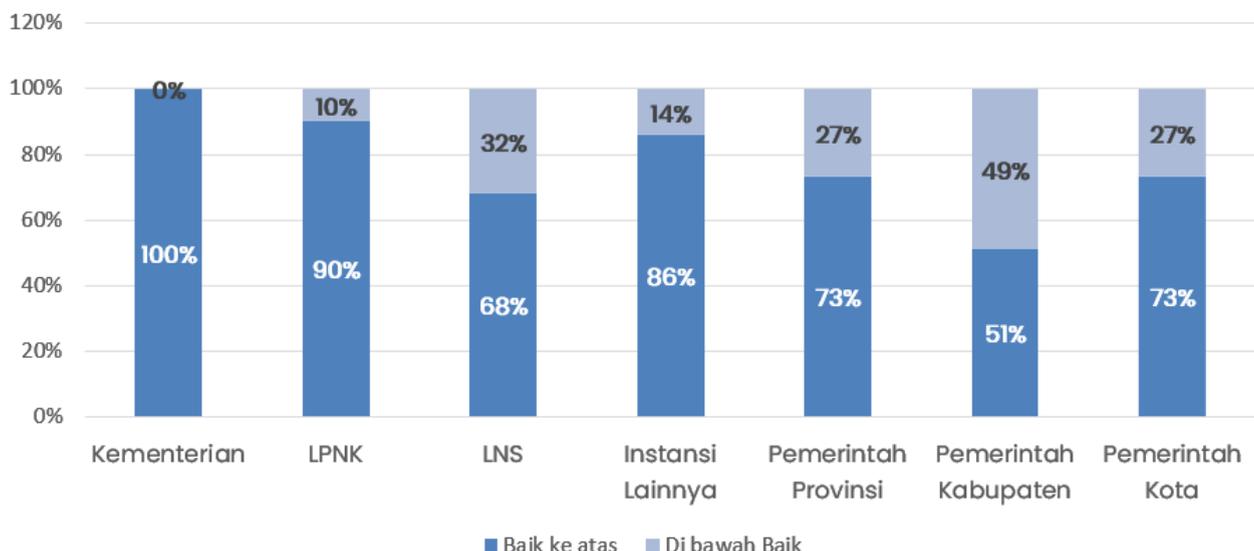
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6		Cukup																	
5	< 1,8		Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

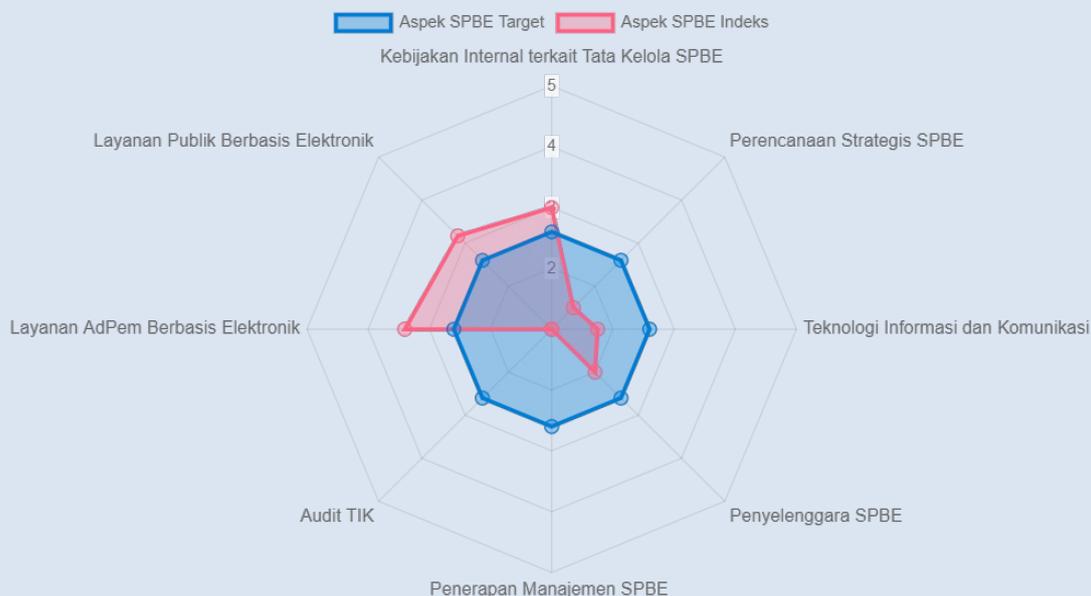
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,49
Domain Kebijakan SPBE	3,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,31
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,40
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,17

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan sudah ada penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan adanya peraturan terkait penyelenggaraan SPBE untuk Kebijakan Internal Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE.

- **Kekuatan**
Ada indikator dalam aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang dapat mendukung pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah Kebijakan Internal Manajemen Data.
- **Kelemahan**
Indikator dalam aspek ini yang merupakan kelemahan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan sudah ada penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dokumen untuk Peta Rencana, Rencana dan Anggaran SPBE sudah disampaikan.

- **Kekuatan**
Tidak ada kekuatan Perencanaan Strategis dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- **Kelemahan**
Seluruh indikator dalam aspek Perencanaan Strategis merupakan kelemahan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara yaitu dokumen Arsitektur, Peta Rencana, Rencana dan Anggaran, Inovasi Proses Bisnis tidak disampaikan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan sudah ada penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dokumen untuk Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data dan, Jaringan Intra Pemerintah Daerah disampaikan.

- **Kekuatan**
Tidak ada kekuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- **Kelemahan**
Indikator dalam aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang merupakan kelemahan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan sudah ada penerapan pada Aspek penyelenggara pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dokumen untuk tim koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE disampaikan.

- **Kekuatan**
Tidak ada kekuatan Penyelenggara SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- **Kelemahan**
Indikator dari Aspek penyelenggara SPBE yang merupakan kelemahan meliputi Tim Koordinasi dan Kolaborasi Penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan tidak ada penerapan manajemen SPBE yang telah berjalan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dokumen-dokumen sebagai pendukung pelaksanaan Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan tidak ada atau tidak disampaikan.

- **Kekuatan**
Tidak ada kekuatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Penerapan Manajemen SPBE.
- **Kelemahan**

Seluruh sisi manajemen SPBE yang meliputi Manajemen Resiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan ada pelaksanaan audit SPBE yang telah berjalan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dokumen-dokumen sebagai pendukung pelaksanaan Audit Aplikasi disampaikan.

- Kekuatan
Tidak ada kekuatan Audit TIK dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Kelemahan
Seluruh bagian audit SPBE yang meliputi Audit Infrastruktur, dan Audit Keamanan menjadi kelemahan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pelaksanaan layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah terpenuhi. Yang sudah terpenuhi adalah layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Kinerja Pegawai dimana sudah menggunakan aplikasi dari Pusat.

- Kekuatan
Seluruh Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah merupakan aplikasi umum dari pusat yang mempunyai level 4, untuk layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kearsipan Dinamis, Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Keenam layanan ini menjadi kekuatan untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam melakukan penyelenggaraan SPBE.
- Kelemahan
Terdapat kelemahan layanan Administasi Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kelemahan tersebut terdapat dalam 2 layanan yang belum dilaksanakan yaitu Pengawasan Internal Pemerintah dan Kinerja Pegawai.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan dari pelaksanaan Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah terpenuhi. Yang sudah terpenuhi adalah layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan
Pada aspek layanan publik berbasis elektronik yang menjadi kekuatan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Publik Sektor 1.
- Kelemahan
Pada aspek layanan publik berbasis elektronik merupakan kelemahan bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan SPBE adalah Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Provinsi Maluku Utara. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Provinsi Maluku Utara, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya pemanfaatan layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kearsipan Dinamis, Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Dengan memanfaatkan aplikasi umum yang sudah ditetapkan maka layanan administrasi pemerintahan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya serta mendapatkan kemudahan interoperabilitas dan kolaborasi antar sistem. Hal lain dengan penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik dimana dimanfaatkan pengaduan pelayanan publik dan layanan public sektor 1 yang dapat dirasakan oleh publik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Provinsi Maluku Utara menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Provinsi Maluku Utara masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE. Beberapa kebijakan tata kelola sudah terakomodasi, namun pada penerapan seperti Arsitektur, Peta Rencana, Rencana dan Anggaran, Inovasi Proses Bisnis belum terpenuhi dengan lengkap. Hal lain terkait aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah terpenuhi tetapi unsur Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan belum terpenuhi. Terkait aspek Penyelenggara SPBE dimana belum dilaksanakan sepenuhnya untuk Tim Koordinasi dan Kolaborasi Penerapan belum dilaksanakan secara optimal. Dengan adanya beberapa kekurangan dalam pemenuhan aspek tersebut, hal ini menyebabkan Layanan Publik yang diberikan tidak efektif dan optimal pemanfaatannya.

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE perlu dilaksanakan secara optimal untuk menjadi acuan aspek Perencanaan Strategis SPBE yang memuat Arsitektur, Peta Rencana, Rencana dan Anggaran menjadi pedoman pelaksanaan SPBE di Provinsi Maluku Utara. Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang tingkat kematangannya masih rendah, agar dapat dilaksanakan sehingga memastikan Layanan dapat dilaksanakan secara optimal.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3